

# PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU

# 2021

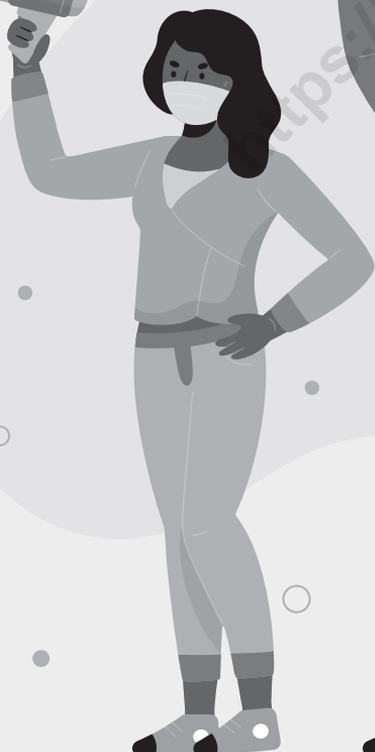


# PROFIL DEMOKRASI INDONESIA

## DI PROVINSI RIAU

# 2021

TEGAKKAN  
DEMOKRASI



## PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 2021

ISSN : 2657-0874  
Nomor Publikasi : 14000.2242  
Katalog : 4601007.14  
Ukuran Buku : 17,6 cm X 25 cm  
Jumlah Halaman : xii + 37 Halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dicetak Oleh : CV. M & N Grafika

Sumber Ilustrasi : *freepik.com*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## TIM PENYUSUN

**Pengarah:**

Drs. Misfaruddin, M.Si

**Editor :**

Rini Apsari, M.Si

Fitri, S.Si, M.E.

**Penulis :**

Metalia Alfa, SST

**Pengolah Data :**

Metalia Alfa, SST

**Pemeriksa Tabel/Grafik :**

Fitri, S.Si, M.E.

**Desain Cover dan Infografis :**

Ade Widiantara, S.Tr.Stat.



## KATA PENGANTAR

Demokrasi merupakan indikator semakin majunya tatanan politik dan kehidupan berbangsa suatu negara. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empiris terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi Negara (pemerintah) dan masyarakat.

Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2021 berisi data capaian IDI yang merupakan gambaran kondisi demokrasi di Provinsi Riau selama tahun 2021. Data IDI 2021 dihitung menggunakan metode baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, publikasi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun strategi pembangunan politik yang lebih tepat. Selain itu, data IDI dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melihat perbandingan demokrasi antar provinsi di Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Pekanbaru, September 2022  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Riau



Misfaruddin



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>3</b>
Latar Belakang.....	3
Tujuan.....	5
Metodologi.....	6
Sistematika Penulisan.....	11
<b>Indeks Demokrasi Indonesia.....</b>	<b>15</b>
Posisi Riau di Indonesia.....	17
Aspek dan Indikator IDI Provinsi Riau.....	21
<b>Penutup.....</b>	<b>29</b>
Kesimpulan.....	29
Saran.....	31
Daftar Pustaka.....	37



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru.....	8
Gambar 2.1.	Indeks Demokrasi Indonesia, 2021.....	15
Gambar 2.2.	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia, 2021.....	16
Gambar 2.3.	Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2021.....	17
Gambar 2.4.	Aspek Kebebasan Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2021.....	18
Gambar 2.5.	Aspek Kesetaraan Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2021.....	19
Gambar 2.6.	Aspek Lembaga Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2021.....	20
Gambar 2.7.	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau menurut Aspek Penyusun dan Peringkat, 2021.....	21
Gambar 2.8.	Indikator IDI Aspek Kebebasan di Provinsi Riau, 2021.....	22
Gambar 2.9.	Indikator IDI Aspek Kesetaraan di Provinsi Riau, 2021.....	23
Gambar 2.10.	Indikator IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau, 2021.....	24
Gambar 3.1.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dan Provinsi Riau menurut Aspek Penyusunnya, 2021.....	30
Gambar 3.2.	Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau, 2021.....	31



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kebebasan.....	9
Tabel 1.2.	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kesetaraan.....	10
Tabel 1.3.	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Lembaga Demokrasi.....	10

<https://riau.bps.go.id>



# PENDAHULUAN

bab 1



PANCASILA

IDI merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang dari ideolog bangsa.

## METODOLOGI

Metode penghitungan IDI metode baru tetap menggunakan *triangulasi* (kombinasi metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif) dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain.

Data kuantitatif dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di koran cetak serta portal berita online, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi

## ASPEK IDI METODE BARU

Demokrasi

Kebebasan  
(7 Indikator)

Kesetaraan  
(7 Indikator)

Kapasitas  
Lembaga Demokrasi  
(8 Indikator)

Dimensi Publik

Dimensi Ekonomi

Dimensi Sosial



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perencanaan pembangunan demokrasi di daerah yang begitu beragam memerlukan data empiris yang dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. IDI dibangun untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di tingkat Provinsi.

### Kilas Balik IDI 2009-2020

IDI merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diukur khusus untuk Indonesia sehingga cara pengukurannya berbeda dengan indeks-indeks lain yang unit analisisnya negara. IDI 2009 - 2020 telah menjadi rujukan pembangunan politik nasional dan daerah. IDI memiliki keunggulan berupa data dan informasi yang detail karena yang dikumpulkan adalah kasus dan data riil. Dengan data tersebut, dinamika kualitas demokrasi lebih mudah dijelaskan dan diintervensi (diperbaiki) oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam perjalanannya IDI memperoleh masukan dari akademisi, masyarakat, pemerintah daerah, K/L, hingga DPR. Sebagai tindak lanjut, masukan-masukan tersebut diinventarisir beriringan dengan evaluasi pada data dan hasil IDI yang telah dihitung. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang

dari ideologi bangsa. Dengan demikian, ukuran-ukuran yang digunakan IDI diharapkan mengandung nilai-nilai penting dalam Pancasila.

### **Revisi Metodologi IDI**

Pada tahun 2010, IDI 2009 untuk pertama kalinya dirilis. Kemudian angka IDI terus dirilis setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Bappenas resmi mengawali kajian revisi IDI. Revisi IDI dilakukan dengan kolaborasi tiga lembaga riset yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU *Research Institute*, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. Angka IDI 2020 merupakan IDI terakhir yang menggunakan metode lama. Pada tahun 2022 IDI telah dihitung dengan menggunakan metode baru.

### **Urgensi Perbaikan Metode IDI**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010–2014, 2015–2019, serta 2020–2024. IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. IDI pertama kali dihitung BPS pada tahun 2009. Selama 12 tahun penghitungan, dijumpai beberapa indikator yang tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan. Selain itu saran dan masukan juga diperoleh dari berbagai kalangan. Diperlukan proses yang tidak sederhana untuk melakukan kajian revisi, agar hasilnya bisa lebih baik dari metode yang ada.

Cara pandang IDI metode lama hanya fokus pada perspektif politik. Sementara, teori demokrasi yang berkembang saat ini melihat demokrasi dalam sudut pandang

yang lebih luas dimana aspeknya mencakup politik, sosial, dan ekonomi. Penggunaan faktor sosial dan ekonomi sebagai ukuran demokrasi tidak ditemukan dalam ukuran Indeks demokrasi lain (*Freedom House, The Economist, Polity Project*, dll). Namun, dalam konteks Indonesia ini sejalan dengan demokrasi Pancasila karena kesetaraan dan keadilan pada bidang sosial ekonomi merupakan hal yang esensial dalam Pancasila dan UUD 1945. Pendekatan yang melibatkan dimensi sosial dan ekonomi ini sebelumnya pernah digunakan konsorsium *Asia Democracy Review* untuk mengukur *Asia Democracy Index* (2011 - 2013).

Selain itu, IDI metode lama belum mengukur kinerja demokrasi pada tingkat Pusat. IDI Pusat menggambarkan perilaku demokrasi di level Pusat, seperti eksekutif (K/L), legislatif (DPR dan DPD), dan yudikatif (MA dan MK). Di sisi lain, diperlukan perubahan pada beberapa indikator IDI yang sudah kurang sensitif dalam menangkap dinamika demokrasi serta perbaikan metodologi penghitungan agar secara statistik lebih tepat seperti bobot, penghitungan skor, dan agregasi indeks. Diperlukan juga perluasan sumber data untuk memberikan gambaran yang lebih akurat serta penyederhanaan tahapan kerja.

## **Tujuan**

Secara umum tujuan penulisan publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau ini adalah untuk mendiseminasikan dan menyosialisasikan hasil IDI serta pemanfaatannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan seluruh *stakeholders* terkait IDI

metode baru. Secara khusus, tujuan penulisan publikasi ini juga untuk memberikan gambaran komprehensif terkait indikator-indikator IDI metode baru terutama IDI Provinsi Riau sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusi *stakeholders* dalam pengukuran IDI serta memanfaatkannya dalam setiap penentuan kebijakan.

## Metodologi

Metode penghitungan IDI metode baru tetap menggunakan triangulasi, yakni menggabungkan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Data kuantitatif dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di koran cetak serta portal berita *online*, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Data tersebut divalidasi dalam FGD yang melibatkan ahli yang relevan. Dalam FGD ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data kuantitatif. Validasi silang juga akan dilakukan pada data-data yang ada di FGD dengan menggunakan data kuantitatif yang tersedia.

Koran yang digunakan adalah koran dengan oplah terbesar yang ada di provinsi. Pengecualian jika koran tersebut memiliki segmen yang spesifik (misal ekonomi atau kriminalitas) sehingga tidak banyak memuat berita-berita yang bersifat umum. Untuk di Provinsi Riau menggunakan berita-berita dari Koran Riau Pos yang dikumpulkan oleh

personel BPS Provinsi Riau, sementara untuk data pusat dan nasional akan dikumpulkan oleh Fungsi Statistik Politik dan Keamanan di BPS.

### **Pemaknaan IDI**

IDI menggambarkan kualitas perilaku demokrasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, tinggi rendahnya IDI di sebuah wilayah merupakan tanggung jawab bersama. IDI metode baru tidak bisa dibandingkan dengan IDI metode sebelumnya karena separuh indikator yang digunakan berbeda. Kenaikan atau penurunan angka IDI dari kedua metode tidak otomatis menggambarkan kenaikan atau penurunan kualitas demokrasi di sebuah wilayah.

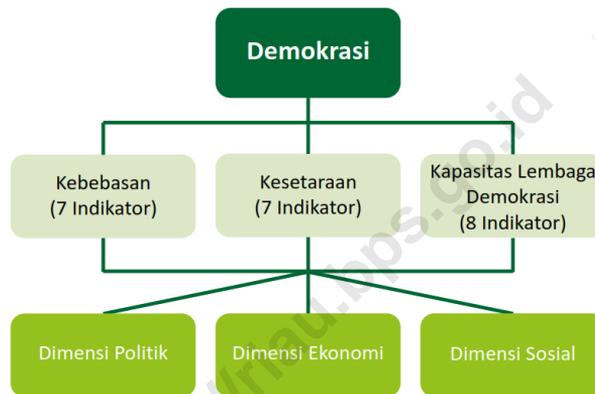
Sementara itu, *backcasting* IDI tidak bisa dilakukan karena tidak semua metode pengumpulan data memungkinkan untuk diulang, terutama FGD pada tingkat pusat yang sebelumnya tidak ada. Selain itu, ada beberapa indikator yang baru tersedia pada tahun 2021 seperti Indeks Keterbukaan Informasi yang dihasilkan oleh Komisi Informasi Pusat.

### **Aspek dan Indikator IDI**

Demokratisasi tidak hanya diartikan sebagai perubahan dari pemerintahan diktator menjadi demokratis, melainkan lebih luas sebagai suatu proses demonopolisasi/pelepasan dari rezim monopoli, yang mencakup aspek politik, ekonomi, maupun sosial menuju sistem demokrasi. Hee Yeon Cho (2008), seorang ilmuwan politik dari Korea Selatan menjabarkan secara gamblang fenomena transisi demokrasi di Asia. Cho menekankan bahwa seorang diktator melakukan penguasaan tidak

hanya terbatas pada sistem politik, tetapi juga monopoli berlapis atas penugasan sumber daya ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, pembaruan pengukuran IDI dilakukan untuk mengukur kualitas demokrasi secara lebih komprehensif dengan meletakkan konsep demokrasi secara lebih luas yang meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial.

Gambar 1.1. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru



Untuk mengukur perkembangan demokrasi maka demonopolisasi dioperasionalkan ke dalam dua aspek yaitu kebebasan (*liberalization*) dan kesetaraan (*equalization*). Dalam perspektif demonopolisasi, aspek kebebasan diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusif) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Selain dua aspek

tersebut, demonopolisasi juga dilihat dari aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.

Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan diukur dari 7 indikator, dimana 4 indikatornya juga mencakup IDI pusat.

Tabel 1.1. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kebebasan

No.	Indikator	IDI Provinsi	IDI Pusat
1.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	√	√
2.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	√	-
3.	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	√	√
4.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	√	√
5.	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	√	-
6.	Pemenuhan hak-hak pekerja	√	-
7.	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	√	√

Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya disini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memungkinkan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Aspek kesetaraan

diukur dari 7 indikator dimana 3 di antaranya juga mengukur IDI di tingkat pusat.

Tabel 1.2. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kesetaraan

No.	Indikator	IDI Provinsi	IDI Pusat
8.	Kesetaraan Gender	√	√
9.	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	√	√
10.	Anti monopoli sumber daya ekonomi	√	-
11.	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	√	-
12.	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	√	√
13.	Akses masyarakat terhadap informasi publik	√	-
14.	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	√	-

Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas lembaga demokrasi diukur dari 8 indikator dimana 7 diantaranya mengukur demokrasi di tingkat pusat.

Tabel 1.3. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

No.	Indikator	IDI Provinsi	IDI Pusat
15.	Kinerja Lembaga Legislatif	√	√
16.	Kinerja Lembaga Yudikatif	√	√
17.	Netralitas Penyelenggara Pemilu	√	√
18.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	√	√
19.	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	√	-
20.	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	√	√
21.	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	√	√
22.	Pendidikan Politik pada kader partai politik	√	√

## **Sistematika Penulisan**

Publikasi ini terdiri dari tiga bab. Bab 1 yaitu Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, metodologi, dan sistematika penulisan. Bab 2 tentang Indeks Demokrasi Indonesia yang menggambarkan hasil penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia metode baru tahun 2021 yang terdiri dari gambaran posisi IDI Provinsi Riau di Indonesia serta nilai aspek dan indikator IDI Provinsi Riau. Bab 3 yaitu Penutup, akan membahas kesimpulan dan saran terhadap IDI Provinsi Riau.

<https://riau.bps.go.id>



# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA **bab 2**

IDI Nasional pada tahun 2021 sebesar

**78,12**

Angka ini sudah mendekati target IDI di RPJMN yang pada 2024 ditargetkan mencapai **78,37**

IDI Provinsi Riau sebesar

**75,66**

berada pada **Kategori Sedang**



## Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau menurut Aspek Penyusun, 2021



IDI Provinsi Riau berada di peringkat **ke-19** diantara 34 provinsi di Indonesia

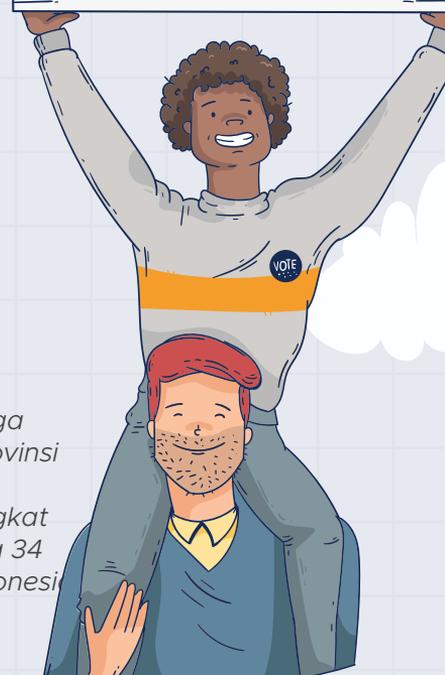


- IDI
- Kebebasan
- Kesetaraan
- Lembaga Demokrasi

Aspek Kebebasan Provinsi Riau (kategori tinggi) peringkat ke-7 diantara 34 provinsi di Indonesia.

Aspek Kesetaraan Provinsi Riau (kategori sedang) peringkat ke-22 diantara 34 provinsi di Indonesia.

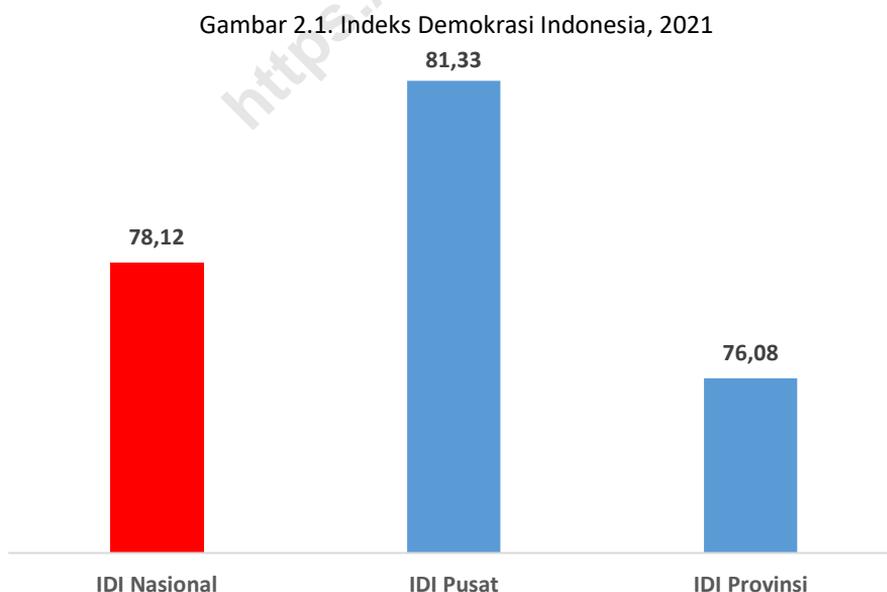
Aspek Lembaga Demokrasi Provinsi Riau (kategori sedang) peringkat ke-27 diantara 34 provinsi di Indonesia.



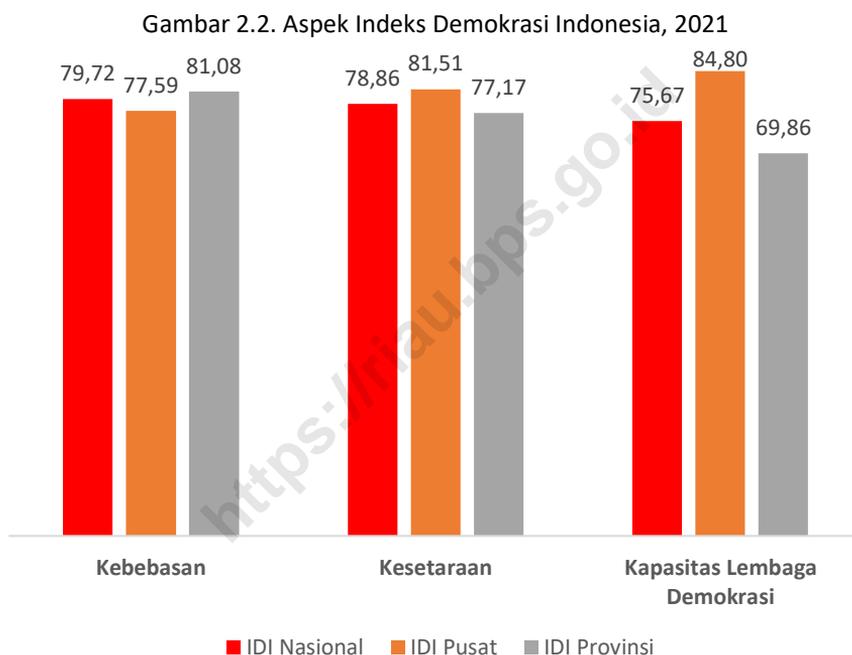


## INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

IDI metode baru mengukur indeks provinsi (data dari lingkup provinsi), pusat (data dari K/L di tingkat pusat), dan nasional yang merupakan agregasi indeks provinsi dan pusat. Dalam penghitungan indeks nasional, bobot indeks pusat adalah 0,39 dan bobot indeks provinsi adalah 0,61. Skala IDI berada pada rentang 0-100, dimana semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks, menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah semakin buruk. Angka IDI dibagi dalam tiga kategori, yakni tinggi (>80), sedang (60-80), dan rendah (<60).



Demokratisasi di Indonesia perlu terus didorong, walaupun saat ini sudah mendekati kategori tinggi. IDI Nasional pada tahun 2021 adalah 78,12. Angka ini sudah mendekati target IDI di RPJMN, yang pada tahun 2024 ditargetkan mencapai mencapai 78,37. Sementara itu, IDI Pusat tercatat 81,33 sedangkan rata-rata IDI Provinsi sebesar 76,08.

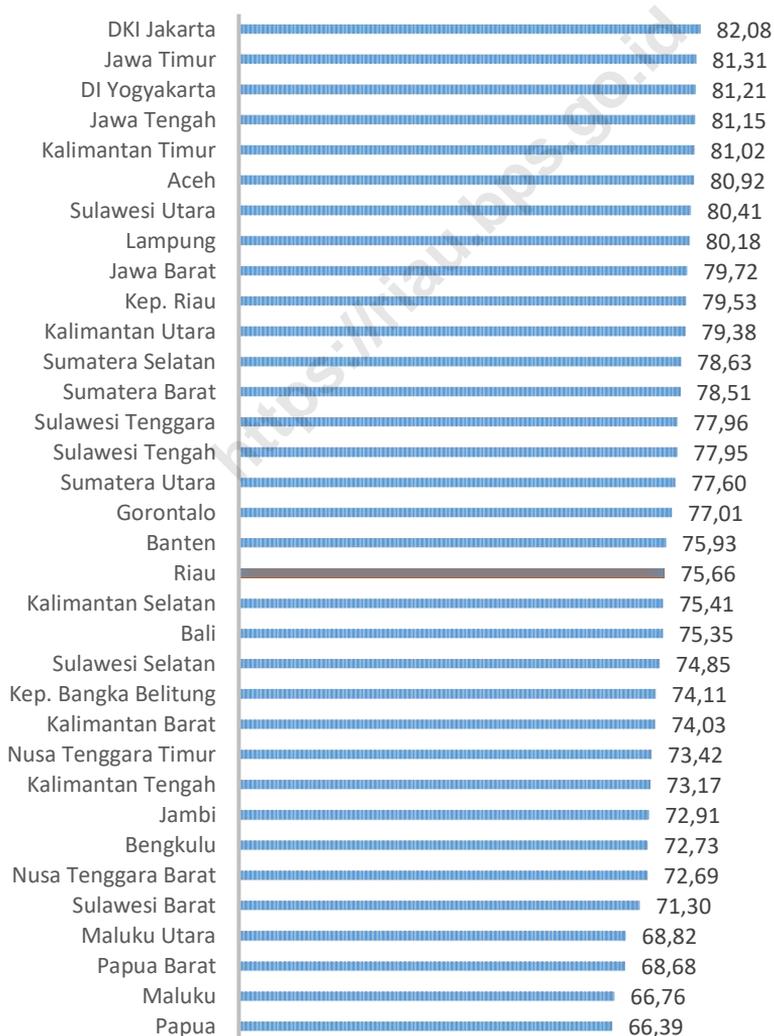


Jika diperhatikan menurut tiga aspek penyusun IDI, IDI Nasional berada pada kategori sedang. Sementara itu, IDI Pusat yang sudah tergolong kategori tinggi, salah satu aspek penyusunnya, yaitu aspek kebebasan, masih berada pada kategori sedang sebesar 77,59. Sebaliknya, rata-rata IDI Provinsi berada pada kategori sedang, tetapi pada aspek kebebasan justru telah masuk kategori tinggi sebesar 81,08.

## Posisi Riau di Indonesia

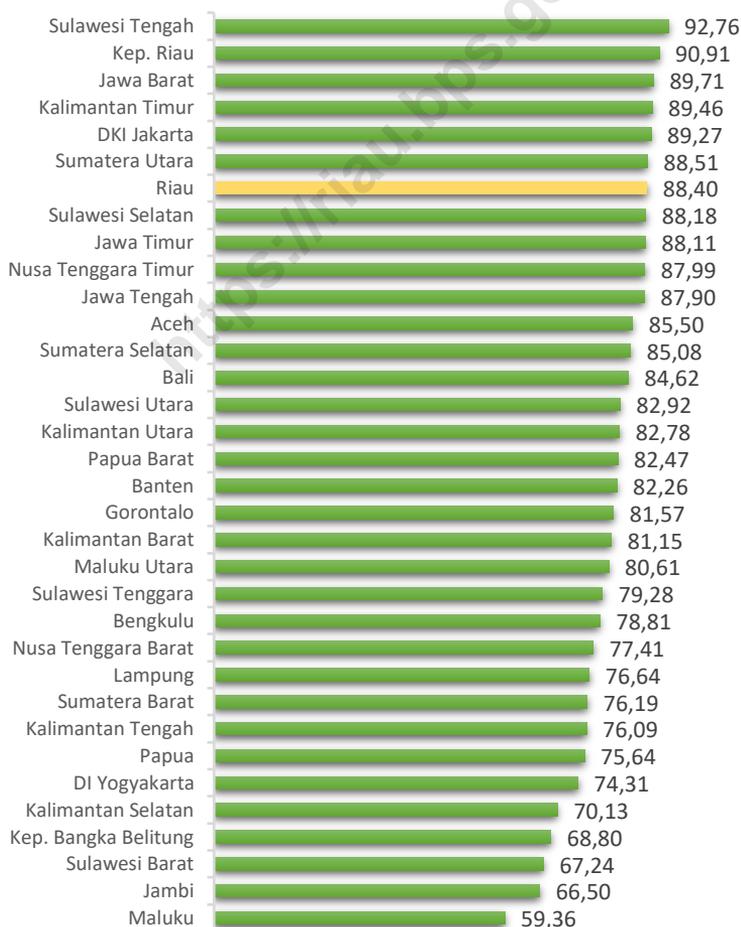
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut provinsi berkisar antara kategori sedang dan tinggi. Tidak ada provinsi yang memiliki nilai IDI dengan kategori rendah (<60). Terdapat 8 provinsi dengan capaian nilai IDI kategori tinggi yaitu di atas 80 dan 26 provinsi lainnya memiliki nilai IDI dalam kategori sedang (berkisar antara 60-80).

Gambar 2.3. Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2021



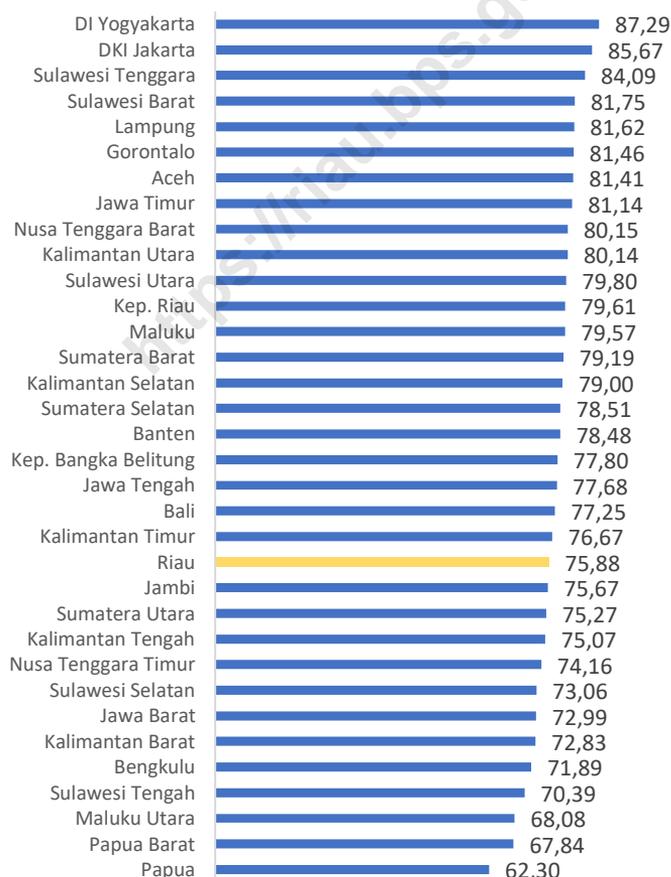
Dari Gambar 2.3 terlihat bahwa IDI tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 82,08 dan diikuti Provinsi Jawa Timur di posisi kedua sebesar 81,31 serta Provinsi DI Yogyakarta di posisi ketiga sebesar 81,21. Sedangkan, IDI terendah terdapat di Provinsi Papua yang memiliki capaian IDI sebesar 66,39. Sementara itu, IDI Provinsi Riau tercatat berada di posisi/peringkat ke-19 di antara 34 provinsi di Indonesia dengan capaian sebesar 75,66 berada pada kategori sedang.

Gambar 2.4. Aspek Kebebasan Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2021



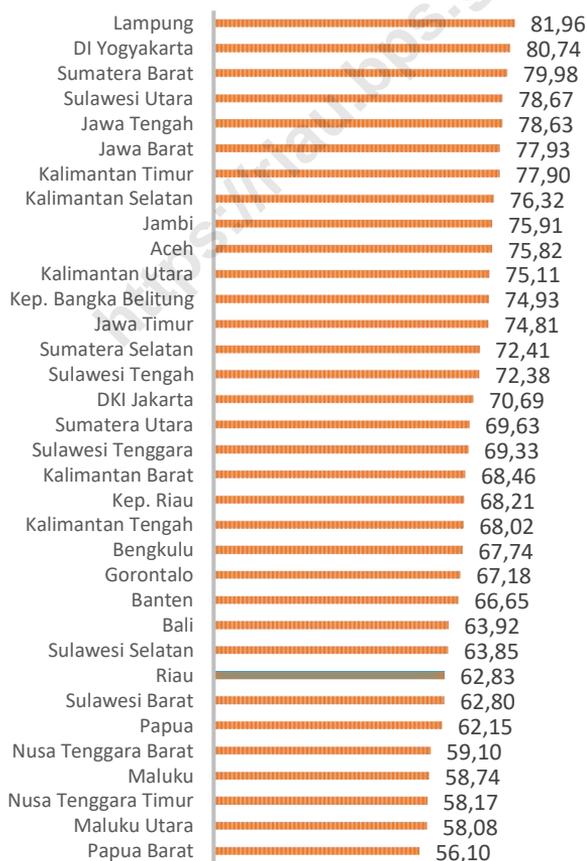
Dari Gambar 2.4 terlihat bahwa nilai aspek kebebasan IDI yang terdiri dari 7 indikator, yang tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 92,76 dan diikuti Provinsi Kepulauan Riau di posisi kedua sebesar 90,91. Sedangkan, nilai aspek kebebasan IDI terendah terdapat di Provinsi Maluku sebesar 59,36. Sementara itu, aspek kebebasan IDI Provinsi Riau tercatat berada di posisi/peringkat ke-7 di antara 34 provinsi di Indonesia. Dengan capaian sebesar 88,40 berada pada kategori tinggi.

Gambar 2.5. Aspek Kesetaraan Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2021



Dari Gambar 2.5 terlihat bahwa nilai aspek kesetaraan IDI yang terdiri dari 7 indikator, yang tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 87,29 dan diikuti Provinsi DKI Jakarta di posisi kedua sebesar 85,67. Sedangkan, nilai aspek kesetaraan IDI terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 62,30. Sementara itu, aspek kesetaraan IDI Provinsi Riau tercatat berada di posisi/peringkat ke-22 di antara 34 provinsi di Indonesia dengan capaian sebesar 75,88 berada pada kategori sedang.

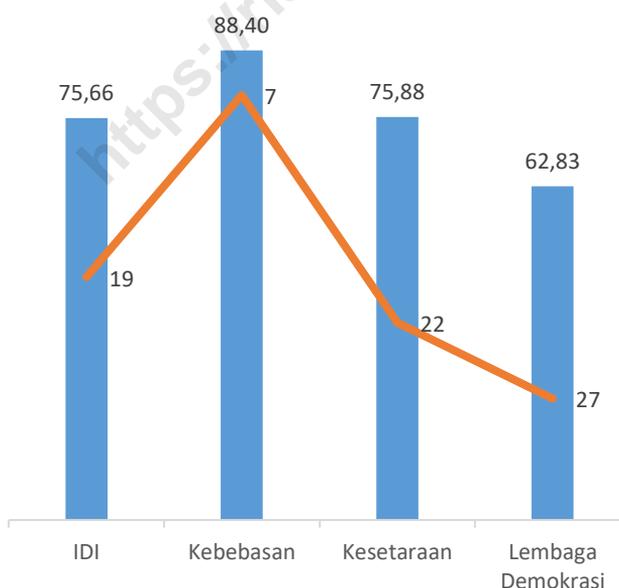
Gambar 2.6. Aspek Lembaga Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2021



Dari Gambar 2.6 terlihat bahwa nilai aspek lembaga demokrasi IDI yang terdiri dari 8 indikator, yang tertinggi terdapat di Provinsi Lampung sebesar 81,96 dan diikuti Provinsi DI Yogyakarta di posisi kedua sebesar 80,74. Sedangkan, nilai aspek lembaga demokrasi IDI terendah terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 56,10. Sementara itu, nilai aspek lembaga demokrasi IDI Provinsi Riau tercatat berada di posisi/peringkat ke-27 di antara 34 provinsi di Indonesia dengan capaian nilai sebesar 62,83 berada pada kategori sedang.

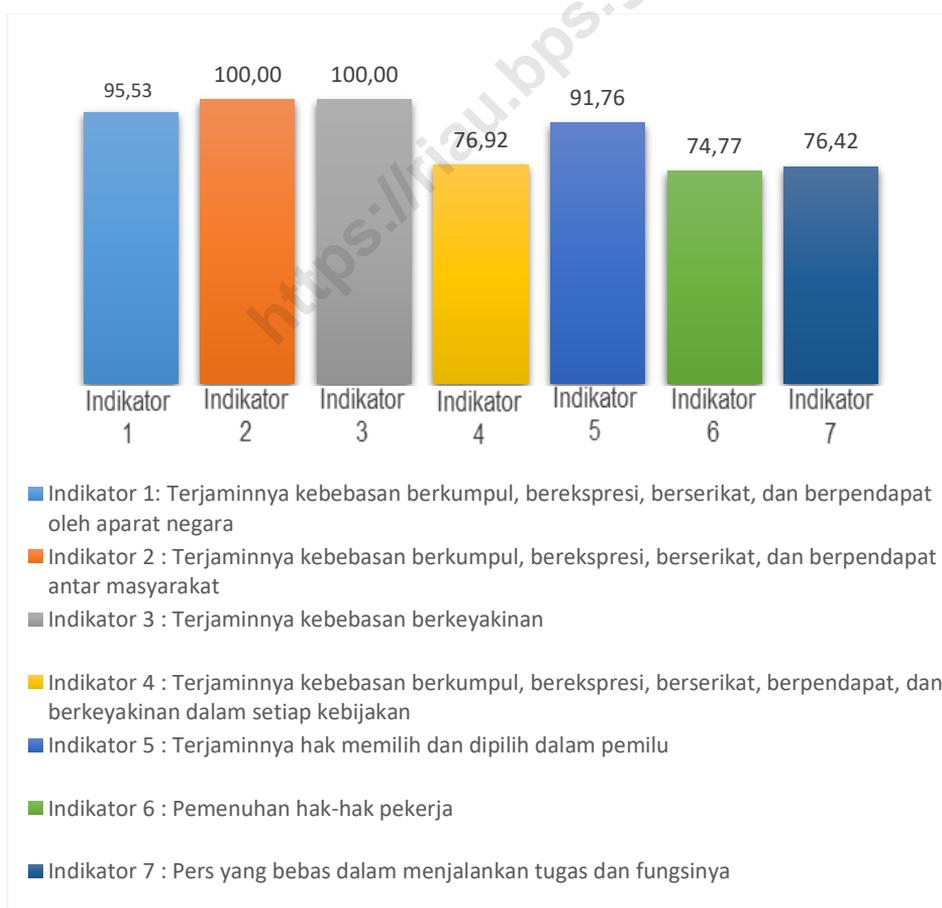
### Aspek dan Indikator IDI Provinsi Riau

Gambar 2.7. Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau menurut Aspek Penyusun dan Peringkat, 2021



IDI di Provinsi Riau berada pada peringkat 19 di antara 34 provinsi lainnya di Indonesia. Jika diperhatikan menurut aspek penyusunnya, nilai aspek kebebasan IDI di Provinsi berada di peringkat paling tinggi dibandingkan dengan aspek lainnya, yaitu peringkat ke tujuh se-Indonesia. Sementara itu, pada aspek kesetaraan dan lembaga demokrasi nilainya berada pada peringkat 22 dan 27. Nilai aspek lembaga demokrasi IDI Provinsi Riau sebesar 62,83 sedikit di atas kategori rendah, sehingga diperlukan perhatian lebih pada aspek lembaga demokrasi di Provinsi Riau.

Gambar 2.8. Indikator IDI Aspek Kebebasan di Provinsi Riau, 2021



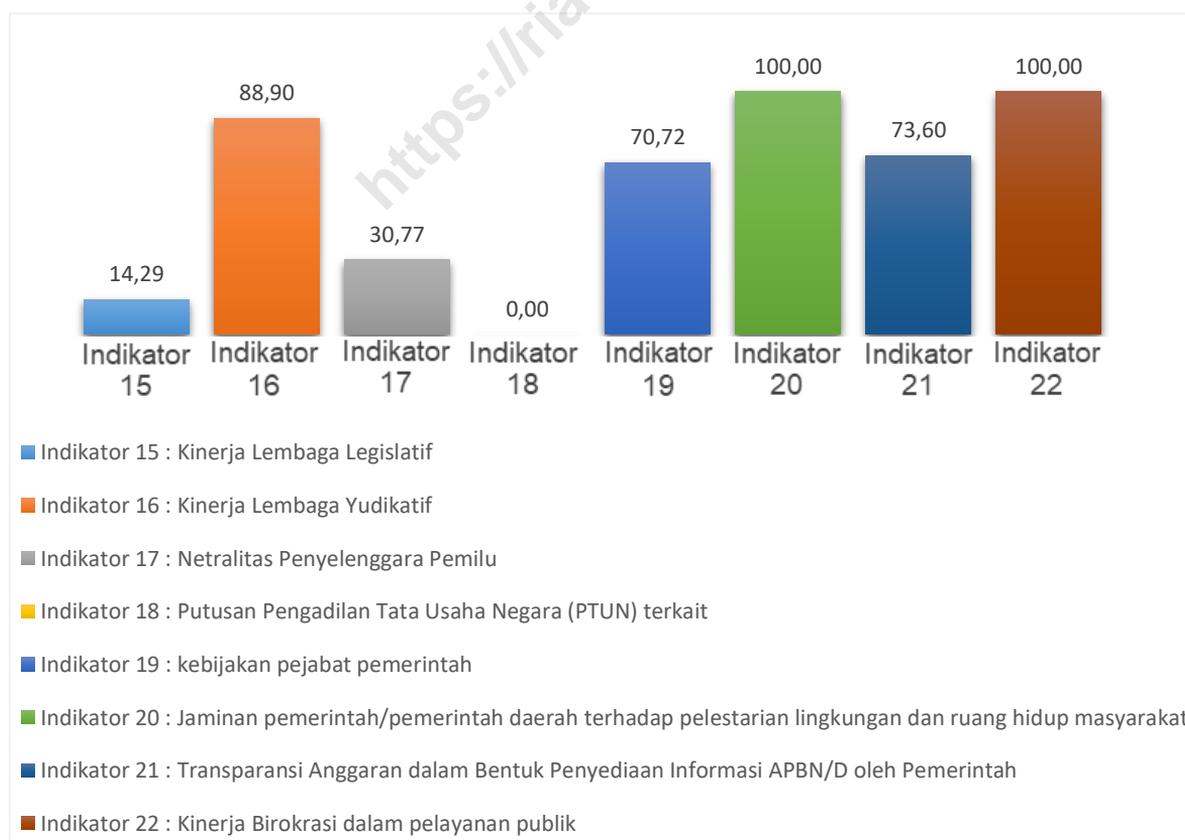
Capaian nilai aspek kebebasan IDI di Provinsi Riau berada pada kategori tinggi (88,40). Gambar 2.8. memperlihatkan capaian nilai indikator IDI pada aspek kebebasan. Dari Gambar 2.8. terlihat bahwa nilai indikator IDI tertinggi dari aspek kebebasan di Provinsi Riau dengan pencapaian 100,00 terdapat pada indikator 2 (terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat) dan indikator 3 (terjaminnya kebebasan berkeyakinan). Kemudian diikuti indikator 1 (terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara) dengan pencapaian sebesar 95,53. Sedangkan, nilai indikator IDI aspek kebebasan Provinsi Riau yang terendah terdapat pada indikator 6 yaitu pemenuhan hak-hak pekerja dengan capaian sebesar 74,77.

Gambar 2.9. Indikator IDI Aspek Kesenjangan di Provinsi Riau, 2021



Capaian nilai aspek kesetaraan IDI di Provinsi Riau berada pada kategori sedang (75,88). Dari Gambar 2.9. terlihat bahwa nilai indikator IDI tertinggi dari aspek kesetaraan di Provinsi Riau terdapat pada indikator 9 (partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan) dengan pencapaian sebesar 100,00 dan diikuti indikator 12 (kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah) di posisi kedua sebesar 95,58. Sedangkan, nilai indikator IDI aspek kesetaraan Provinsi Riau terendah terdapat pada indikator 11 (akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial) dengan pencapaian sebesar 54,70.

Gambar 2.10. Indikator IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau, 2021



Capaian nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi IDI di Provinsi Riau berada pada kategori sedang (62,83). Dari Gambar 2.10. terlihat bahwa nilai indikator IDI tertinggi dari aspek kapasitas lembaga demokrasi di Provinsi Riau dengan pencapaian sebesar 100,00 terdapat pada indikator 20 (transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah) dan indikator 22 (pendidikan politik pada kader partai politik). Sedangkan, nilai indikator IDI aspek kapasitas lembaga demokrasi Provinsi Riau terendah terdapat pada indikator 18 (putusan PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah) dengan pencapaian sebesar 0,00 dan indikator 15 (kinerja lembaga legislatif) dengan pencapaian 14,2





# METODE BARU

**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)** merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah Indonesia pada RPJMN 2010 – 2014, 2015 – 2019, serta 2020–2024.

**IDI 2021** merupakan yang pertama dihitung dengan metode baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan IDI metode sebelumnya (2009-2020) karena separuh indikator yang digunakan berbeda.

**Backcasting IDI tidak bisa dilakukan** karena tidak semua metode pengumpulan data memungkinkan untuk diulang, terutama FGD pada tingkat pusat yang sebelumnya tidak ada. Selain itu, ada indikator yang baru tersedia pada tahun 2021 seperti Indeks Keterbukaan Informasi yang dihasilkan oleh Komisi Informasi Pusat.





## PENUTUP

### Kesimpulan

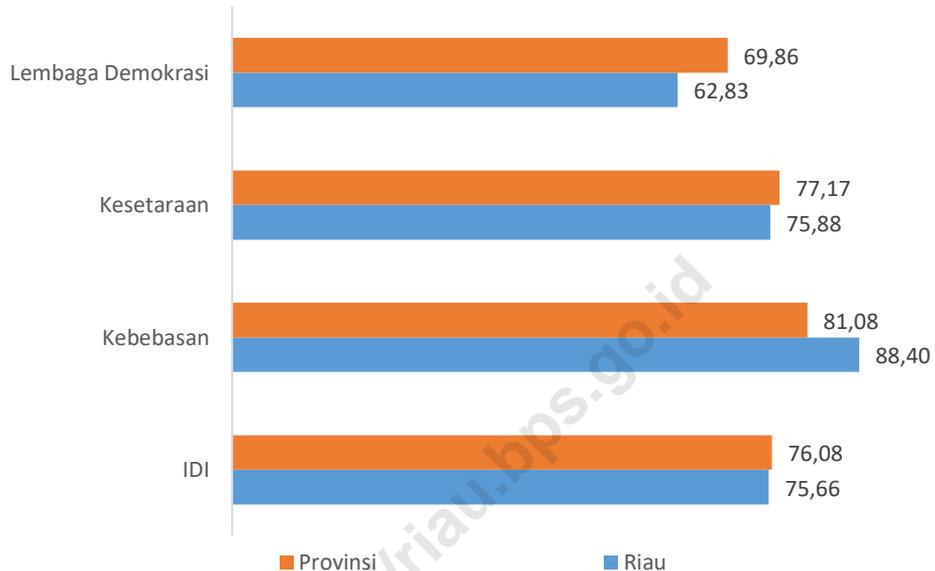
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah Indonesia pada RPJMN 2010–2014, 2015–2019, serta 2020–2024. IDI 2021 merupakan IDI yang pertama dihitung dengan metode baru, sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan dengan metode sebelumnya (2009–2020). IDI disusun oleh 22 indikator yang dikombinasikan menjadi 3 aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Skala IDI berada pada rentang 0–100, dimana semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks, menunjukkan kualitas demokrasi suatu wilayah semakin buruk.

Angka IDI dibagi dalam tiga kategori, yakni tinggi (>80), sedang (60–80), dan rendah (<60). IDI di Provinsi Riau pada tahun 2021 sebesar 75,66 berada pada kategori sedang dengan peringkat 19 di antara 34 provinsi di Indonesia. Angka ini lebih rendah 0,42 poin dibandingkan dengan rata-rata IDI seluruh provinsi di Indonesia.

Jika dilihat dari ketiga aspek penyusunnya, nilai aspek kebebasan IDI di Provinsi Riau paling tinggi dibandingkan dengan dua aspek penyusun lainnya. Nilai aspek kebebasan IDI di Provinsi Riau sudah berada pada kategori tinggi yakni sebesar 88,40 lebih tinggi 7,32 poin dibandingkan dengan rata-rata nilai aspek kebebasan IDI

seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini berada pada peringkat tujuh di antara provinsi lainnya di Indonesia.

Gambar 3.1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dan Provinsi Riau menurut Aspek Penyusunnya, 2021

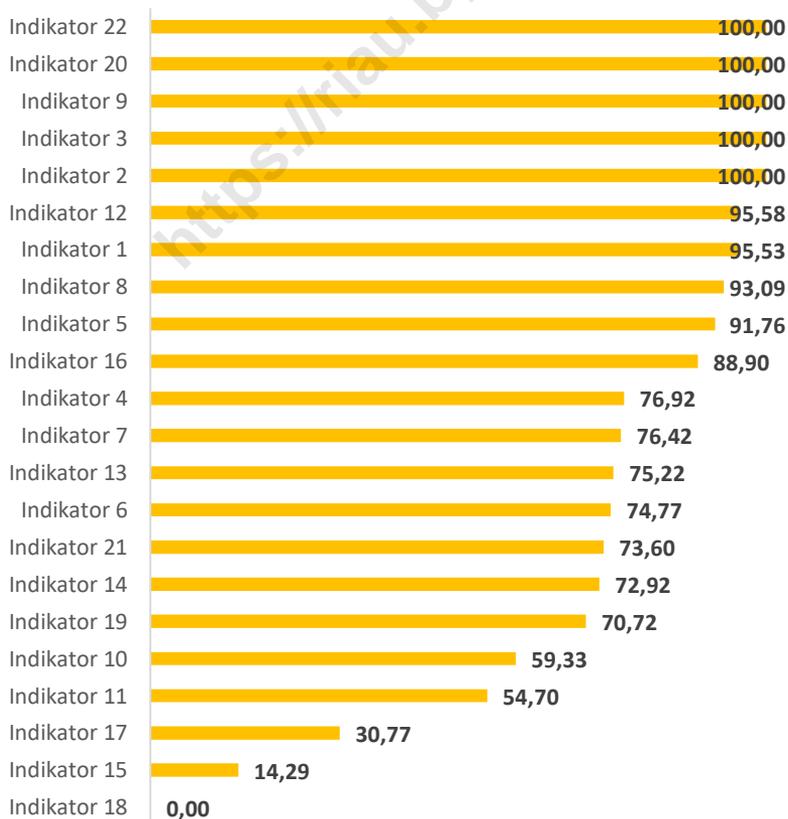


Namun, pada dua aspek penyusun IDI lainnya, Provinsi Riau masih memiliki nilai di bawah rata-rata provinsi. Nilai kedua aspek tersebut berada pada kategori sedang. Nilai aspek kesetaraan IDI Provinsi Riau sebesar 75,88 berada pada peringkat 22 di antara provinsi lainnya di Indonesia. Angka ini lebih rendah 1,29 poin dibandingkan dengan rata-rata nilai aspek kesetaraan seluruh provinsi. Sementara itu, nilai aspek lembaga demokrasi IDI Provinsi Riau sebesar 62,83 berada pada peringkat 27 di antara provinsi lainnya dan lebih rendah 7,03 poin dibandingkan dengan rata-rata nilai aspek lembaga demokrasi IDI seluruh provinsi.

## Saran

Sesuai dengan hasil penghitungan IDI Provinsi Riau 2021, aspek kesetaraan dan aspek lembaga demokrasi perlu mendapatkan perhatian khusus. Semakin rendah nilai IDI, artinya demokrasi di suatu daerah semakin terhambat. Untuk menentukan langkah-langkah perbaikan demokrasi di suatu daerah, perlu diperhatikan lebih dalam pada indikator-indikator yang mendapatkan skor rendah. Jika diperhatikan pada Gambar 3.2., lima skor indikator IDI terendah di Provinsi Riau merupakan indikator penyusun aspek kesetaraan dan lembaga demokrasi.

Gambar 3.2. Indikator Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau, 2021



Tantangan demokrasi di Provinsi Riau ditunjukkan oleh lima indikator dengan nilai berada pada kategori rendah. Indikator-indikator tersebut antara lain indikator 18, 15, dan 17 yang merupakan indikator penyusun aspek lembaga demokrasi serta indikator 11 dan 10 yang merupakan indikator penyusun aspek kesetaraan. Untuk itu, perlu ditelaah lebih dalam terkait indikator-indikator ini sehingga dapat dilakukan perbaikan kondisi demokrasi di Provinsi Riau.

Pada aspek lembaga demokrasi, terdapat tiga indikator terendah pada IDI Provinsi Riau. Pertama, indikator 18 dengan skor 0,00, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah. Indikator ini bersumber dari jumlah kebijakan/keputusan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah per jumlah pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah kebijakan/keputusan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah di PTUN akan menjadikan skor indikator ini menjadi rendah. Kedua, indikator 15 dengan skor 14,29, yaitu kinerja lembaga legislatif. Indikator ini didapatkan dari persentase Perda yang disahkan terhadap target Propemperda. Ketiga, indikator 17 dengan skor 30,77, yaitu netralitas penyelenggara pemilu. Indikator ini merupakan perbandingan jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per jumlah pemerintah daerah yang bersumber dari Bawaslu.

Selain aspek lembaga demokrasi, aspek kesetaraan juga harus diperhatikan karena dua indikator penyusunnya masih

berada pada kategori rendah. Pertama, indikator 11 dengan skor 54,70, yaitu akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial. Data ini merupakan persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Kedua, indikator 10 dengan skor 59,33, yaitu anti monopoli sumber daya ekonomi. Data ini bersumber dari indeks persaingan usaha yang diperoleh dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

<https://riau.bps.go.id>





# DAFTAR PUSTAKA

<https://riau.bps.go.id>



## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2021. *Naskah Akademik Revisi Indeks Demokrasi Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.

\_\_\_\_\_. 2022. *[Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi 2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/34/2159/1/-metode-baru-indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html>. diakses pada 21 Agustus 2022 pukul 11:02.

\_\_\_\_\_. 2022. *[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi 2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/34/2160/1/-metode-baru-aspek-indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-provinsi.html>. diakses pada 21 Agustus 2022 pukul 11:03.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2021. *Profil demokrasi indonesia di Provinsi Riau 2020*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

\_\_\_\_\_. 2022. *Angka IDI 2021 Provinsi Riau*. <https://riau.bps.go.id/statictable/2022/06/21/388/angka-idi-2021-provinsi-riau.html>. diakses pada 21 Juni 2022 pukul 9:52.

Widiyasari, Ika Rusinta. 2022. *Revisi Indeks Demokrasi Indonesia*. <https://papuabaratnews.co/wacana/revisi-indeks-demokrasi-indonesia/> diakses pada 3 September 2022 pukul 18:23.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

---

<https://riau.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No.12, Pekanbaru 28131

Telp. (0761) 23042

Homepage: //riau.bps.go.id Email : bps1400@bps.go.id

ISSN 2657-0874



9 772657 087000